

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tugas dan wewenang BPK disebutkan dalam UU RI No.15 Tahun 2006, tugas BPK menurut UU tersebut masuk ke dalam bagian ke Satu yaitu : pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah pusat , Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan Lembaga negara Lainnya ,BUMN,Badan Layanan Umum, BUMD dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan Negara. Sesuai wewenangnya BPK dapat melakukan tiga macam pemeriksaan pertama yakni pemeriksaan atas laporan Keuangan pemerintah dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kedua ,pemeriksaan kinerja yakni pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD, dan DPRD. Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu yakni pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan , pemeriksaan Investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal pemerintah. Setiap hasil pemeriksaan BPK di sampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihakterkait. Laporan hasil pemeriksaan selain

disampaikan kepada Lembaga perwakilan BPK juga menyampaikannya kepada Pemerintah.

Pengendalian internal dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan keamanan terhadap aset dari pemborosan, kecurangan dan ke tidak efisienan penggunaan serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi tentang perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan untuk mencapai pengendalian internal yang memadai. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab untuk mewujudkan *Good Governance*. Tuntutan dan kebutuhan era globalisasi, perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal, nasional, maupun internasional terhadap pemerintah Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dengan adanya pengendalian intern.

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Regulasi tersebut menjadi

landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah Implikasi dari adanya otonomi adalah kewajiban pemerintah untuk lebih transparan.

Perubahan-perubahan mendasar pada awal reformasi pengelolaan keuangan Negara berkaitan dengan: sistem penganggaran, struktur anggaran, peristilahan, pengukuran kinerja, konsep pusat-pusat pertanggung jawaban, desentralisasi, standar kebijakan akuntansi dan perubahan sistem akuntansi keuangan ke sistem ganda dengan dasar pencatatan atas dasar kas yang mengarah pada basis akrual. Oleh karena itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara/daerah untuk memperkecil potensi kecurangan. Banyaknya pemerintah daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (*Fraud*). Kecurangan dalam organisasi baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern.

Salah satu jenis pemeriksaan BPK yang dilaksanakan setiap tahunnya terhadap pemerintah daerah adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah. Sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan pemerintah/pemerintah daerah atau badan lain, BPK diberi kewenangan untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, pernyataan pendapat atau opini sebagai hasil pemeriksaan keuangan.

Kota Padang adalah salah satu entitas yang diperiksa oleh BPK setiap tahunnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Padang. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2015 yang memuat Opini (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 24.A/LHP/XVIII.PDG/05/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24.C/LHP/XVIII.PDG/05/2016 tanggal 25 Mei 2016.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Padang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul Tugas Akhir “ **HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG** “

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah – masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah :

1. Apa temuan dari Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern pada LKPD PemkoPadang ?
2. Apa rekomendasi BPK kepada Walikota Padang selaku pemerintah Daerah atas temuan hasil pemeriksaan tersebut ?

## **1.3.Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengungkapkan temuan yang didapatkan oleh BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang
2. Untuk mengetahui apa saja yang direkomendasikan oleh BPK terkait temuan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pemerintah kota Padang

## **1.4.Lokasi Tempat Permintaan Data**

Permohonan permintaan data yang berjudul “Penerapan Akrua basis pada LKPD Kota Padang Ta 2015 “ dari LHP tersebut terdapat “ Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padangpada LKPD Kota Padang tahun 2015” , ini dilakukan di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Kota Padang.

### **1.5.Lokasi Tempat Magang dan Waktu Pelaksanaan Magang**

Nama Instansi : Badan Pemeriksa Keuangan RI PerwakilanProvinsi  
Sumatera Barat

Alamat Instansi : Jln. Khatib Sulaiman No.54 Padang

Waktu Pelaksanaan Magang : Tanggal 18 Desember 2018 s/d 15 Februari 2018

### **1.6.Sistematika Penulisan**

Agar penulisan laporan ini dapat berjalan dengan lancar dan sistematis, maka penulis menguraikan pembahasan tentang Penerapan akrual basis pada laporan keuangan pemerintah daerah kota Padang yang terdiri dari V ( lima ) bab sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian pendahuluan memuat uraian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Apa yang dipaparkan dalam pendahuluan hendaknya dapat mengantarkan pembaca pada isi pokok (substansi) Tugas Akhir.

##### **1.1. Latar Belakang**

Latar belakang timbulnya masalah menguraikan secara kualitatif dan kuantitatif kondisi objektif permasalahan pada saat ini, mengenai penerapan akrual basis yang didukung dengan temuan fakta-fakta yang mengarah ke proses peningkatan nilai tambah secara kreatif.

## 1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan atau rumusan masalah merupakan pijakan di dalam penyusunan Tugas Akhir. Semua pembahasan (analisis) harus mengacu pada rumusan masalah yang dibuat. Permasalahan dapat dibuat dengan bentuk pernyataan atau pertanyaan. Jika dibuat dalam bentuk pertanyaan, bentuk kalimat tanya yang dibuat harus tegas dan jelas. Demikian juga jika dibuat dalam bentuk pernyataan, jangan sampai menimbulkan penafsiran yang ambigu (ganda). Untuk perumusan masalah .yang berbentuk deskriptif.

## 1.3. Tujuan

Tujuan penelitian berisi uraian tentang tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

## 1.4.Lokasi Tempat Magang dan Permohonan permintaan data

Pada bagian ini menjelaskan tempat dilaksanakannya kegiatan magang dan dimana lokasi permintaan data yang diambil untuk kelengkapan penulisan Tugas Akhir

## 1.5.Lokasi Tempat Magang dan Waktu Pelaksanaan Magang

Bagian ini menjelaskan dimana mahasiswa/i tersebut melakukan kegiatan magangnya selama 40 hari kerja. Serta waktu pelaksanaan kegiatan tersebut kapan dimulai dan kapan berakhirnya kegiatan tersebut.

## 1.6.Sistematika penulisan

Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana sistematika penulisan dan konten yang dibahas pada setiap bab secara rinci dan jelas.

## **Bab II. Tinjauan Pustaka**

Bagian ini menjelaskan konsep dan teori yang digunakan dalam tugas akhir. Penjelasan konsep dipaparkan dalam bentuk umum ke khusus, dimulai dari konsep yang lebih besar kemudian dikerucutkan kepada konsep kecil berupa variabel penelitian. Bagian – bagian penting dari konsep seperti berbagai definisi, jenis/klasifikasi, penggunaan pada realita serta kekurangan dan kelebihan konsep tentang akrual basis pada LKPD Kota Padang dapat dibahas pada bagian ini. Pada bagian akhir juga dijelaskan kerangka penelitian yang berisi gambar/figur mengenai bagaimana penelitian/konsep di dalam penelitian akan dijelaskan.

## **Bab III. Gambaran Umum BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**

Bab ini menjelaskan gambaran mengenai tempat magang/tempat melakukan penelitian pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat .Pada bagian awal bagian ini menjelaskan tentang profil BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang berisi penjelasan mengenai kegiatan utama BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, serta visi dan misi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera. Bagian kedua adalah penjelasan mengenai sejarah BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera secara umum. Penjelasan sejarah harus mengacu kepada literatur/ sumber yang valid dari internal BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera. Bagian selanjutnya adalah penjelasan mengenai unit tempat magang dilaksanakan. Unit ini bisa berbentuk divisi, departemen, bagian atau sub bagian yang menjadi tempat magang dan tempat



dilaksanakannya penelitian. Selanjutnya dijelaskan juga struktur organisasi. Struktur organisasi yang dijelaskan adalah struktur pada organisasi tempat magang dan bukan struktur organisasi dalam skala besar.

#### **Bab IV. Pembahasan**

Pembahasan merupakan hasil temuan yang dihasilkan dari proses penelitian menggunakan metode yang dijelaskan pada Bab I Pendahuluan. Pembahasan harus menyajikan fakta terkait dengan penelitian dengan memberikan keterangan sumber atau cara memperoleh data. Bagian pertama yaitu menjelaskan data /hasil temuan. Hasil dijelaskan berdasarkan fakta yang ditemukan. Setelah memaparkan data yang ditemukan, pembahasan dilanjutkan dengan bagian analisis. Pada bagian ini dijelaskan keterkaitan antara hasil yang ditemukan dengan teori yang dipakai (bisa dalam bentuk penjelasan maupun perbandingan), pembuktian hipotesis, analisis kekurangan atau kelebihan (input – ouput). Penjelasan paling penting pada bagian ini adalah jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada Bab I.

#### **Bab V. Penutup**

Pada bagian ini dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan dijelaskan dalam bahasa yang tegas dan lugas dengan menyampaikan hasil inti dari penelitian. Bagian ini juga menjelaskan saran baik saran untuk institusi juga saran untuk penelitian selanjutnya.